



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL

31 DESEMBER 2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Rekapitulasi Anggaran, Laporan Penyerapan Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0343/BAWASLU.SJ/KU.00.03/VI/20-19 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 revisi POK ke-04 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.6886349/2022 tanggal 9 Desember 2021 dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan secara sederhana dan mudah dipahami sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Malang, 31 Desember 2022
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**
Koordinator Sekretariat,

TRIMUDA ANCAS WICAKSONO, A.Md

NIP. 19790107 200903 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REKAPITULASI ANGGARAN

Laporan Rekapitulasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup Belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada karena Bawaslu Kabupaten Malang masih belum satker dan masih bersifat *Ad- Hoc*.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp 4.556.229.000,-** atau mencapai **93 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp 4.260.233.771,-**

Secara rinci pos belanja yang telah dilaksanakan dapat dicermati dalam table di bawah ini:

Dalam table di bawah berisi 3 pos belanja yang dirinci pagu, realisasi dan persentase penyerapan.

**TABEL REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA
BAWASLU KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp. 751.435.000	Rp. 708.095.000	94
Belanja Barang	Rp. 3.804.794.000	Rp. 3.552.128.771	93
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	Rp. 4.556.229.000	Rp. 4.260.233.771	93

2. LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN

Laporan Penyerapan Anggaran menyajikan berbagai komponen, program kegiatan, rincian besaran perencanaan, realisasi dan persentase penyerapan anggaran.

Laporan keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dapat disajikan berdasarkan output kegiatan sebagai berikut :

- a) Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 5.383.200,- atau 81%;
- b) Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 56.246.095,- atau 94%;
- c) Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.542.914.030,- atau 90%;
- d) Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc adalah sebesar Rp. 230.311.000,- atau 92%;
- e) Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 496.959.878,- atau 82%;
- f) Layanan BMN adalah sebesar Rp 6.198.000,- atau 88%;
- g) Layanan Hukum adalah sebesar 10.296.623 atau 99%;
- h) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi adalah sebesar Rp 2.905.000 atau 68%;
- i) Layanan Perkantoran adalah sebesar Rp 1.339.809.313 atau 94%;
- j) Layanan Manajemen SDM adalah sebesar Rp 2.512.500 atau 56%;
- k) Layanan Perencanaan dan Penganggaran adalah sebesar Rp 9.575.000 atau 83%;
- l) Layanan Pemantauan dan Evaluasi adalah sebesar Rp 7.176.206 atau 68%;
- m) Layanan Manajemen Keuangan adalah sebesar Rp 28.461.800 atau 87%;
- n) Layanan Reformasi Kinerja adalah sebesar Rp 2.428.000 atau 39%;
- o) Layanan Penyelenggaraan Kearsipan adalah sebesar Rp 1.145.000 atau 50%;
- p) Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS adalah sebesar Rp 1.515.337.326 atau 98%.

Secara rinci komponen kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dicermati dalam table di bawah ini :

Dalam table di bawah berisi 16 komponen kegiatan yang dirinci jumlah pagu, jumlah realisasi dan persentase penyerapan.

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	TOTAL PAGU	TOTAL BELANJA	PERSENTASE BELANJA
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALANG		4.556.229.000	4.260.223.771	93%
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	1.515.224.000	1.331.814.203	87%
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC	66.196.000	61.629.295	93%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	6.598.000	5.383.200	81%
002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota	6.598.000	5.383.200	81%
051	Koordinasi penanganan pelanggaran	2.960.000	2.100.000	70%
052	Koordinasi penyelesaian sengketa proses	3.638.000	3.283.200	90%
BKC	Pemantauan Lembaga	59.598.000	56.246.095	94%
002	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota	59.598.000	56.246.095	94%
051	Pengawasan Pemilu Partisipatif	24.108.000	23.377.810	96%
052	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	18.852.000	18.134.285	96%
054	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	8.423.000	6.519.000	77%
055	Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Disabilitas	8.215.000	8.215.000	100%

6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU	848.973.000	773.225.030	91%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	848.973.000	773.225.030	91%
006	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	599.101.000	542.914.030	90%
051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	735.000	0	0%
052	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	80.720.000	77.300.000	95%
053	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	20.730.000	15.279.340	73%
054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	202.860.000	189.525.000	93%
055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	8.705.000	4.682.800	53%
056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	46.555.000	34.273.284	73%
057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	238.796.000	221.853.606	92%
6661.QDB.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	249.872.000	230.311.000	92%
053	Rekrutmen panwaslu kecamatan	174.680.000	155.119.000	88%
054	Rekrutmen Panwaslu Desa/Kelurahan	75.192.000	75.192.000	100%
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU	600.055.000	496.959.878	82%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	600.055.000	496.959.878	82%
003	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	600.055.000	496.959.878	82%
051	Publikasi dan dokumentasi	3.340.000	1.019.200	30%

052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	220.285.000	171.118.812	77%
053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	3.585.000	1.360.000	37%
053	Fasilitasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran	44.500.000	41.500.000	93%
054	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	323.170.000	278.142.866	86%
055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	5.175.000	3.819.000	73%

115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	1.506.571.000	1.413.072.242	93%
---------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------	------------

5156	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.506.571.000	1.413.072.242	93%
-------------	---	----------------------	----------------------	------------

EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.439.131.000	1.361.773.936	94%
------------	--	----------------------	----------------------	------------

956	Layanan BMN	6.975.000	6.198.000	88%
------------	--------------------	------------------	------------------	------------

052	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	6.975.000	6.198.000	88%
-----	--	-----------	-----------	-----

957	Layanan Hukum	10.340.000	10.296.623	99%
------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------

053	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	10.340.000	10.296.623	99%
-----	--	------------	------------	-----

958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4.220.000	2.905.000	68%
------------	--	------------------	------------------	------------

052	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	4.220.000	2.905.000	68%
-----	--	-----------	-----------	-----

963	Layanan Data dan Informasi	6.245.000	2.565.000	41%
------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------

052	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	6.245.000	2.565.000	41%
-----	--	-----------	-----------	-----

994	Layanan Perkantoran	1.411.351.000	1.339.809.313	94%
------------	----------------------------	----------------------	----------------------	------------

001	Gaji dan Tunjangan	751.435.000	708.095.000	94%
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	659.916.000	631.714.313	95%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	4.450.000	2.512.500	56%
954	Layanan Manajemen SDM	4.450.000	2.512.500	56%
052	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	4.450.000	2.512.500	56%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	62.990.000	48.785.806	77%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	11.520.000	9.575.000	83%
052	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	11.520.000	9.575.000	83%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10.550.000	7.176.206	68%
052	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	10.550.000	7.176.206	68%
955	Layanan Manajemen Keuangan	32.480.000	28.461.600	87%
052	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	32.480.000	28.461.600	87%
961	Layanan Reformasi Kinerja	6.150.000	2.428.000	39%
052	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	6.150.000	2.428.000	39%
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2.290.000	1.145.000	50%
052	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	2.290.000	1.145.000	50%

6838.QIC.004	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS	1.534.434.000	1.515.337.326	98%
---------------------	---	----------------------	----------------------	------------

401	Honorarium	1.046.100.000	1.046.100.000	100%
402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair	174.300.000	170.000.000	97%
403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan	20.452.000	20.350.500	99%
404	Pelayanan administrasi perkantoran	293.582.000	278.886.826	94%

054	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	8.240.000	6.862.724	83%
055	Evaluasi pengawasan pemilu/pemilihan	6.100.000	4.337.800	71%
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	8.325.000	4.026.500	48%
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	8.325.000	4.026.500	48%
051	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	8.325.000	4.026.500	48%
EAC	Layanan Umum	11.550.000	9.260.000	80%
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	11.550.000	9.260.000	80%
051	Pengelolaan BMN	5.120.000	3.980.000	78%
052	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	6.430.000	5.280.000	82%
EAF	Layanan SDM	7.925.000	6.289.000	79%
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	7.925.000	6.289.000	79%
051	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	7.925.000	6.289.000	79%
EAG	Layanan Hukum	25.625.000	24.392.206	95%
002	Layanan Hukum Bawaslu Kab/Kota	25.625.000	24.392.206	95%
051	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan	25.625.000	24.392.206	95%
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	8.440.000	5.351.054	63%
002	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota	8.440.000	5.351.054	63%
051	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	8.440.000	5.351.054	63%
EAJ	Layanan Data dan Informasi	8.560.000	6.625.820	77%
002	Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota	8.560.000	6.625.820	77%
051	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	8.560.000	6.625.820	77%
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	7.525.000	4.274.500	57%
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	7.525.000	4.274.500	57%
051	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	7.525.000	4.274.500	57%
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	11.893.000	5.780.300	49%
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	11.893.000	5.780.300	49%
051	Pengelolaan Administrasi Keuangan	11.893.000	5.780.300	49%
115.WA	Program Dukungan Manajemen	1.397.845.000	1.354.043.462	97%
4352	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	1.397.845.000	1.354.043.462	97%
EAA	Layanan Perkantoran	1.397.845.000	1.354.043.462	97%
003	Bawaslu Kabupaten/Kota	1.397.845.000	1.354.043.462	97%
001	Gaji dan Tunjangan	731.559.000	712.093.000	97%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	666.286.000	641.950.462	96%